

Analisis Ekonomi dan Sosial Terhadap Kesenjangan Antar Wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Fazila Ghani Revirgin, Pradifta Pilar Putra Maulana, Duwi Wahyuni, Danang
Avrilio Satria Dava Wibowo, Calista Evanya Nafitri Putri, Anggi Rahajeng

Universitas Gadjah Mada

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Economic Development, Regional
Equality, Economy and Social, Makassar
City



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

The analysis addresses regional equality in Makassar City from both economic and social perspectives, focusing on population density, educational infrastructure (number of schools), economic growth, poverty levels, and the open unemployment rate. Although Makassar has experienced rapid economic growth particularly as the economic center of South Sulawesi, gaps between regions, especially between the city center and suburban areas, still persist. These disparities directly affect the quality of life, exacerbate inequality, and hinder the welfare of affected communities. Policy interventions are essential, such as poverty reduction through skills training, optimization of information technology to enhance transparency and accountability, revitalization of slum areas to reduce environmental impacts, digitization of SMEs to create new jobs in the digital sector, and multi-stakeholder collaboration to ensure effective planning and implementation. These efforts will improve community welfare and foster equality among regions, serving as a tangible step toward sustainable development.

ABSTRAK

Analisis ini membahas kesetaraan antar wilayah di Kota Makassar dari perspektif ekonomi dan sosial, terfokuskan pada analisis tentang

Kepadatan Penduduk, Infrastruktur Pendidikan (jumlah sekolah), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, terlebih menjadi pusat perekonomian di Sulawesi Selatan, kesenjangan antar wilayah terutama antara pusat kota dan kawasan pinggiran masih ada. Hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, memperparah ketimpangan, dan kesejahteraan masyarakat yang memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi kebijakan seperti pengentasan kemiskinan melalui pelatihan keterampilan, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, revitalisasi kawasan kumuh sebagai upaya mengurangi dampak lingkungan, digitalisasi UMKM menciptakan lapangan kerja baru sektor digital, dan kolaborasi multi pihak yang berperan penting untuk memastikan perencanaan tercapai, dengan ini kesejahteraan masyarakat akan meningkat serta mendorong terciptanya kesetaraan antar wilayah, sebagai wujud nyata dari pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kota Makassar, sebagai pusat pertumbuhan utama di Sulawesi Selatan, mengalami dinamika pembangunan yang sangat pesat. Perkembangan infrastruktur, perdagangan, dan layanan publik menunjukkan kemajuan signifikan. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan serius berupa ketimpangan antar wilayah. Sebagian wilayah di Kota Makassar memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, sementara wilayah lain masih tertinggal. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memunculkan kesenjangan sosial yang makin terasa dari waktu ke waktu. Warga di wilayah pinggiran atau kawasan dengan fasilitas minim kerap menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses peluang yang seharusnya setara.

Fenomena ini menandai perlunya pendekatan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam. Tidak cukup hanya melihat data ekonomi dan sosial secara parsial, tetapi juga penting memahami konteks spasial, bagaimana distribusi ketimpangan itu membentuk pola yang memengaruhi keseharian masyarakat. Melalui “**Analisis Ekonomi dan Sosial terhadap kesetaraan antar wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan**” ini, diharapkan menjadi rumusan strategi pembangunan dan rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder lainnya yang lebih adil dan inklusif,

*Corresponding Author

Email: 1fazilaghaniirevirgin2004@mail.ugm.ac.id 2pradiftapilarputramaulana@mail.ugm.ac.id 3duwiwahyuni@mail.ugm.ac.id 4danangavriliosatriad@mail.ugm.ac.id 5calistaevanyanafitriputri@mail.ugm.ac.id 6anggi.rahajeng@mail.ugm.ac.id

serta mendorong terciptanya kesetaraan antar wilayah dalam satu kota, sebagai wujud nyata dari pembangunan berkelanjutan.

PERMASALAHAN WILAYAH

- a. Banyak pakar yang mengemukakan bahwa dengan bertambahnya penduduk akan diiringi dengan munculnya berbagai permasalahan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan kegiatan kegiatan di beberapa sektor yang pada akhirnya menimbulkan beberapa permasalahan di perkotaan seperti pengangguran, lingkungan yang kumuh, kemacetan, dan lain sebagainya. Penduduk umumnya akan memilih bertempat tinggal di daerah perkotaan dan kawasan sekitar kota, hal ini berdasarkan fakta jumlah penduduk di kota yang lebih besar dari daerah lain dan tidak terkecuali hal ini juga terjadi pada Kota Makassar (Syam, S., & Wahab, A. 2015).
- b. Walaupun Makassar merupakan daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan, nyatanya masih terjadi permasalahan di dalam hal penunjang peningkatan IPM yaitu pendidikan. Masih banyak sekolah sekolah di Kota Makassar yang secara infrastruktur masih kurang atau mengalami kerusakan, dari 11 pulau yang masuk dalam administrasi Kota Makassar, terdapat salah satu pulau yaitu Pulau Bone Tambung yang memiliki bangunan sekolah yang sangat memprihatinkan. Fasilitas sekolah di sejumlah pulau juga masih sangat minim dan harus di tingkatkan.
- c. Pada kenyataannya kemiskinan masih menjadi permasalahan di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Kemiskinan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini tidak terkecuali di kota kota besar seperti Makassar, sebagian masyarakat yang memilih bermukim di lorong lorong Kota Makassar tetap miskin walaupun pemerintah setempat telah melakukan beberapa program pemberdayaan, hal ini disebabkan oleh masyarakat disana yang memiliki sifat pemalas untuk bekerja, dan cenderung pasrah dengan keadaan yang ada menjadikan kemiskinan tersebut tidak kunjung teratasi. Faktor lainnya adalah mereka tidak mempunyai keterampilan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya (Umar, D. A., 2023)
- d. Dalam aspek ketenagakerjaan, pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama yang terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah pengangguran ini diantaranya laju pertumbuhan penduduk, kurangnya lapangan pekerjaan, tidak siapnya penduduk usia produktif dalam perkembangan teknologi, ekonomi yang tidak stabil, tingkat pendidikan, dan besaran upah (Priastiwiand Handayani 2019). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar menjadi yang paling tinggi di 2014 padahal Makassar juga menjadi daerah dengan UMK paling tinggi di Sulawesi Selatan.
- e. Kepadatan penduduk merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di banyak kota kota besar di Indonesia, salah satunya Kota Makassar. Permasalahan lain yang timbul akibat kepadatan penduduk yaitu tidak meratanya persebaran penduduk, kepadatan ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Usaha guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung lebih uit dilakukan. Hal seperti ini juga akan berimbas pada permasalahan kesejahteraan, ketersediaan lahan, sosial ekonomi, keamanan, serta kebutuhan akan pangan yang meningkat dan dampak yang paling buruk adalah kerusakan lingkungan (Yunianto, D. 2021).

LITERATURE REVIEW

Kota Makassar, sebagai wilayah pusat metropolitan yang berkembang di kawasan Indonesia Timur, menunjukan dinamika aspek ekonomi dan sosial yang berkontribusi pada pembangunan regionalnya. Melihat hal ini, banyak peneliti yang tertarik untuk menganalisis faktor apa yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, seperti adanya pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh beberapa hal, adapun keberlanjutan sosial terutama melalui kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berperan penting dalam membentuk struktur ekonomi kota.

Elemen inilah secara kolektif menggarisbawahi interdisipliner pembangunan di Kota Makassar. Selain itu, hubungan interaksi antara demografi penduduk, tingkat pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi menyoroti kesenjangan wilayah dan tingkat kemiskinan. Dibawah ini penjelasan secara spesifik aspek ekonomi dan sosial dalam pembangunan ekonomi khususnya di Kota Makassar, literatur yang telah diperoleh sebagai berikut:

Aspek Ekonomi

- a. Demografi Penduduk: Pertumbuhan penduduk Makassar signifikan berpengaruh pada pembangunan ekonomi, berkorelasi antara partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi (Rahman & Hamzah, 2017).
- b. Infrastruktur Pendidikan: Investasi dalam pendidikan berdampak positif pada penyerapan lapangan kerja, layanan dasar berpengaruh besar (Wahyuni et al., 2024). Pengeluaran pemerintah untuk

pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan IPM wilayah, menunjukkan hubungan langsung dengan kondisi sosial-ekonomi (Hasan, 2019).

- c. Ketidaksetaraan dan Kemiskinan Regional: Tingkat pengangguran dan inflasi yang tinggi memperburuk tingkat kemiskinan, dengan pendidikan dan pengeluaran per kapita berbanding terbalik dengan kemiskinan (Ginting, 2023).

Aspek sosial

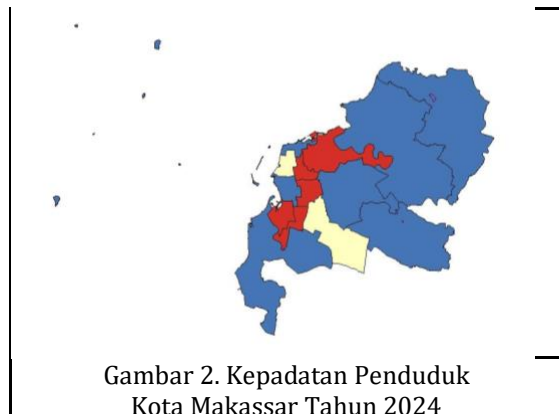
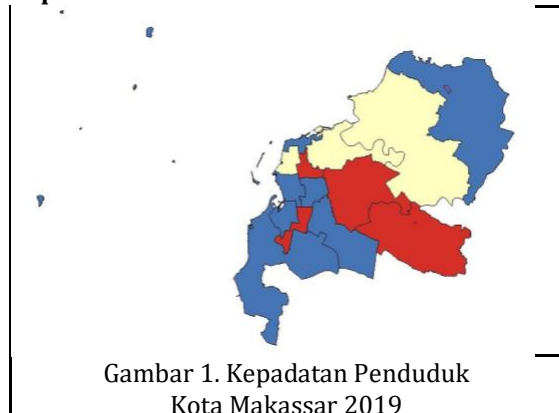
- a. Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi di Makassar didorong oleh penyerapan tenaga kerja, dengan upah yang secara signifikan mempengaruhi tingkat ketenagakerjaan (Wahyuni et al., 2024). Ketergantungan kota pada pendanaan pemerintah pusat berperan dalam kebutuhan mengembangkan sektor ekonomi lokal (Tutu, 2022).
- b. Kualitas Hidup: IPM sebagai cerminan kondisi sosial ekonomi, dipengaruhi oleh distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk layanan dasar (Hasan, 2019).

Sementara itu, indikator ekonomi menunjukkan jalan menuju pertumbuhan, tantangan tetap ada dalam mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pendekatan yang seimbang yang berfokus pada pembangunan inklusif sangat penting untuk kemajuan berkelanjutan di Kota Makassar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Variabel

Kepadatan Penduduk

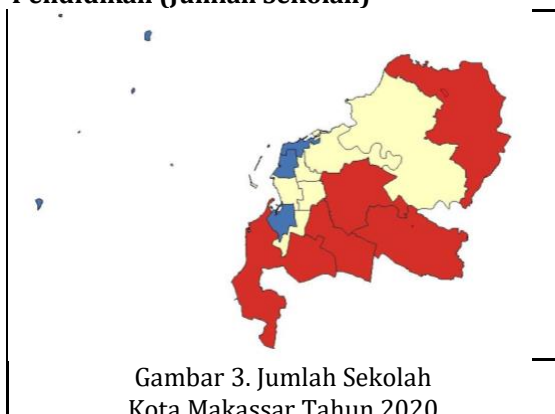


Kecamatan	Tahun	
	2019	2024
Biringkanaya	4572	4494

Bontoala	27237	26307
Makassar	33935	32530
Mamajang	27312	25811
Manggala	6193	6704
Mariso	33241	32306
Panakkukang	8778	8468
Rappocini	18431	16346
Tallo	24070	25387
Tamalanrea	3638	3353
Tamalate	10170	9363
Ujung Pandang	11047	9459
Ujung Tanah	8076	8346
Wajo	15806	14769

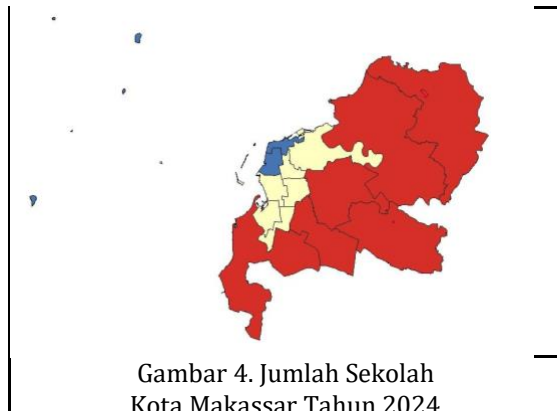
Kepadatan penduduk di Kota Makassar mengalami penurunan yang cukup signifikan, dapat dilihat berdasarkan gambar 1, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki kepadatan yang tinggi (berwarna merah) dan sedang (berwarna krem), akan tetapi pada gambar 2, terlihat beberapa kecamatan mengalami kenaikan dan penurunan, kecamatan seperti Kecamatan Panukkang dan Kecamatan Manggala mengalami penurunan dari yang awalnya merupakan kecamatan dengan kepadatan tinggi berubah menjadi kecamatan dengan kepadatan rendah (berwarna biru). Kecamatan lainnya seperti Kecamatan Talio justru berubah menjadi kecamatan dengan kepadatan yang tinggi seperti digambarkan pada gambar 2.

Pendidikan (Jumlah Sekolah)



Berdasarkan klasifikasi jumlah sekolah tahun 2024, wilayah dengan jumlah sekolah tinggi (115–224 sekolah) meliputi Biringkanaya, Manggala, Panakkukang, Rappocini, Tamalanrea, dan Tamalate (daerah pada peta berwarna merah). Ini mencerminkan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan akses pendidikan yang luas. Wilayah dengan jumlah sekolah sedang (51–115 sekolah) seperti Bontoala, Makassar, Mamajang, dan Tallo (daerah pada peta berwarna krem) menunjukkan distribusi pendidikan yang cukup merata namun masih berpotensi untuk ditingkatkan. Sementara itu, wilayah dengan jumlah

sekolah rendah (35–51 sekolah) seperti Mariso, Ujung Pandang, Ujung Tanah, dan Wajo (daerah pada peta berwarna biru) perlu mendapatkan perhatian lebih, karena terbatasnya fasilitas pendidikan dapat memengaruhi akses dan kualitas layanan pendidikan di daerah tersebut.



Kecamatan	2020	2024
Kec. Biringkanaya	286	244
Kec. Bontoala	80	73
Kec. Makasar	111	100
Kec. Mamajang	84	80
Kec. Manggala	188	183
Kec. Mariso	50	51
Kec. Panakuk kang	174	171
Kec. Rappocini	172	146
Kec. Tallo	112	115
Kec. Tamalanrea	139	144
Kec. Tamalate	187	178
Kec. Ujung Pandang	90	82
Kec. Ujung Tanah	49	46
Kec. Wajo	33	34

Berdasarkan gambar 4, jumlah sekolah di Kota Makassar mengalami peningkatan yang tinggi, dimana pada tahun 2020, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tamanlarea yang hanya memiliki jumlah sekolah dengan tingkat sedang (berwarna krem) berubah menjadi Kecamatan yang memiliki jumlah sekolah yang tinggi (berwarna merah)

Pertumbuhan Ekonomi (Distribusi PDRB)

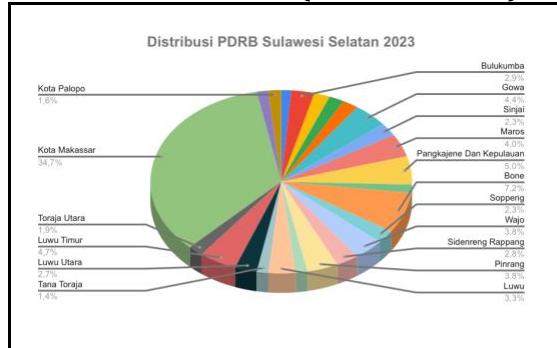


Diagram 1. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2023 (BPS, diolah)

Gambar di atas menunjukkan distribusi PDRB Sulawesi Selatan tahun 2023, di mana Kota Makassar menyumbang porsi terbesar sebesar 34,7%. Dominasi ini mencerminkan peran Makassar sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan pemerintahan provinsi. Kontribusinya jauh melampaui daerah lain, seperti Bone (7,2%) dan Pangkajene dan Kepulauan (5,0%). Ketimpangan ini menunjukkan tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi di Makassar dan sekaligus tantangan dalam pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Selatan.

Tingkat Kemiskinan



Grafik 1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar (Ribu Jiwa) 2020-2024 (BPS, diolah)

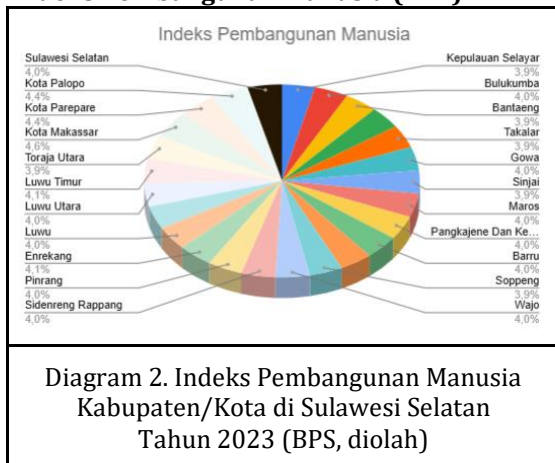
Grafik 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 (dalam ribuan jiwa). Terjadi peningkatan dari 69,98 ribu jiwa (2020) ke 74,69 ribu jiwa (2021), lalu turun menjadi 71,83 ribu jiwa (2022). Namun, jumlahnya kembali naik signifikan menjadi 80,32 ribu jiwa pada 2023 dan sedikit menurun ke 79,53 ribu jiwa di 2024. Secara umum, tren menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Grafik 2 menunjukkan penurunan jumlah pengangguran terbuka di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, terdapat 110.833 pengangguran, yang kemudian berkurang secara bertahap setiap tahunnya menjadi 95.596 orang pada tahun 2021, 86.267 orang di tahun 2022, 69.124 orang pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai angka 67.668 orang di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan kondisi ketenagakerjaan di Makassar selama periode lima tahun terakhir. Tren garis yang menunjukkan penurunan secara konsisten mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam menangani pengangguran telah memberikan hasil yang positif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Makassar menempati posisi teratas dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kontribusi 4,6%, mencerminkan kemajuan signifikan dalam kualitas hidup warganya dibandingkan daerah lain. Sebagai pusat utama dalam pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tingginya IPM menunjukkan akses masyarakat yang lebih baik terhadap layanan dasar. Namun, dominasi ini juga mengungkap ketimpangan antar wilayah. Kabupaten seperti Wajo, Toraja Utara, dan Kepulauan Selayar hanya mencapai angka antara 3,9% hingga 4,1%, menandakan kesenjangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.

Hasil Regresi

. reg IPM DistribusiPDRB TingkatKemiskinan JumlahPenduduk						
Source	SS	df	MS	Number of obs	=	24
Model	186.676866	3	62.2256219	F(3, 20)	=	10.99
Residual	113.207918	20	5.66039588	Prob > F	=	0.0002
				R-squared	=	0.6225
				Adj R-squared	=	0.5659
Total	299.884783	23	13.0384688	Root MSE	=	2.3792

	IPM	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
DistribusiPDRB		.5959628	.1645723	3.62	0.002	.252671 .9392545
TingkatKemiskinan		-.5038413	.1918957	-2.63	0.016	-.9041286 -.1035539
JumlahPenduduk		-.0088489	.0038002	-2.33	0.030	-.0167759 -.0009218
_cons		79.51529	2.126022	37.40	0.000	75.08048 83.95009

Gambar 3. Hasil Regresi Distribusi PDRB, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Tahun 2023 (BPS, diolah)

Distribusi PDRB

Koefisien: 0.59596

P-Value: 0.002 (signifikan)

Setiap kenaikan 1 unit pada distribusi PDRB akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.60 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Ini menunjukkan bahwa semakin merata distribusi pendapatan daerah, semakin tinggi kualitas hidup masyarakat. Secara kritis, ini menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi. Secara humanis, ketika hasil pembangunan dibagi adil, lebih banyak orang dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tingkat Kemiskinan

Koefisien: -0.50843

P-Value: 0.016 (signifikan)

Setiap kenaikan 1 persen tingkat kemiskinan berpotensi menurunkan IPM sebesar 0.51 poin. Ini konsisten dengan fakta bahwa kemiskinan merupakan penghambat utama dalam pembangunan manusia. Secara kritis, angka ini mengingatkan bahwa pembangunan tidak akan berhasil jika banyak warga masih hidup dalam kekurangan. Secara humanis, tingginya kemiskinan berarti banyak orang tidak mampu sekolah, tidak bisa berobat, dan hidup dalam ketidakpastian.

Jumlah Penduduk

Koefisien: -0.00885

P-Value: 0.030 (signifikan)

Setiap kenaikan jumlah penduduk (satuan tergantung data, misalnya ribuan atau jutaan) menyebabkan penurunan IPM sebesar 0.0088 poin. Secara kritis, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan infrastruktur dapat menurunkan kualitas hidup. Secara humanis, pertumbuhan penduduk tanpa perencanaan menyebabkan layanan publik tidak mencukupi, sekolah penuh, rumah sakit kekurangan fasilitas, dan beban hidup meningkat.

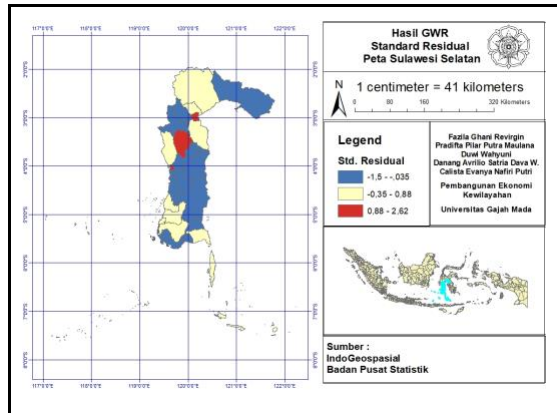
Statistik Model

R-squared: 0.6225

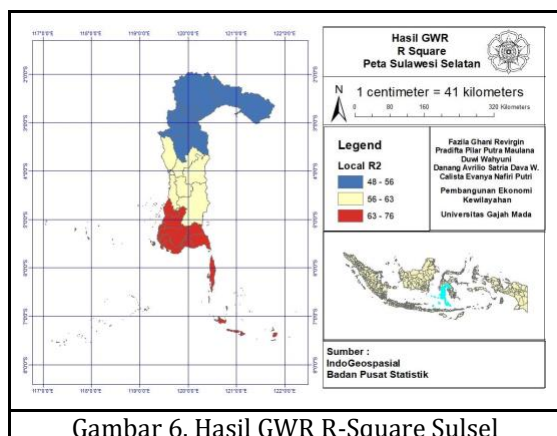
Ini berarti 62,25% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Prob > F: 0.0002

Hasil Peta Analisis



Gambar 5. Hasil GWR Standard Residual Sulsel



Gambar 6. Hasil GWR R-Square Sulsel

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis di atas, adapun rumusan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendorong kesetaraan antar wilayah di Kota Makassar yang inklusif berkelanjutan, yaitu:

- Pengentasan Kemiskinan. Mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan maupun pembentukan koperasi (komunitas) yang memberdayakan masyarakat secara aktif, khususnya pada masyarakat usia produktif agar sekaligus bisa menekan angka pengangguran.
- Optimalisasi Teknologi Informasi. Hal ini tentu mendukung tata kelola dan perencanaan pembangunan berbasis data serta bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data.
- Revitalisasi Kawasan Kumuh. Mengingat kontribusi sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dalam PDRB di Kota Makassar sangatlah kecil, tentu perlu kebijakan tindak lanjut karena sektor ini berperan penting dalam mengurangi dampak lingkungan.
- Digitalisasi UMKM. Teknologi ecommerce membantu usaha meningkatkan penjualan karena akses pasar lebih luas dan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor digital.
- Kolaborasi Multipihak. Pemerintah sebagai penggerak utama, sektor swasta sebagai investor, akademisi menjadi pusat penelitian dan data, dan masyarakat turut aktif dalam pelaksanaan secara langsung. Koordinasi penting dilakukan untuk tercapainya tujuan bersama, yaitu kesetaraan antar wilayah.

SIMPULAN

Ketimpangan antar wilayah di Kota Makassar masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Wilayah pusat kota menunjukkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, dan infrastruktur umum, sedangkan wilayah pinggiran seperti Biringkanaya, Manggala, dan Tamalanrea masih tertinggal dalam berbagai aspek layanan dasar. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut, termasuk tingginya angka kemiskinan.

Ketimpangan tidak hanya mencerminkan perbedaan geografis, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan pembangunan. Untuk mewujudkan kesetaraan

yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan memperhatikan kelompok rentan dan wilayah tertinggal. Pemerataan akses layanan publik, penguatan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mengurangi ketimpangan dan menciptakan keadilan sosial di seluruh wilayah Kota Makassar.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (25 Maret 2025). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2024. <https://makassarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODIjMg==/produk-domestik-regional-bruto-pdrb-kota-makassar-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2024). *Kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Makassar, 2020–2024*. Makassar: BPS Kota Makassar. <https://makassarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQjMg==/kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-makassar.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). Jumlah angkatan kerja menurut kabupaten/kota (jiwa), 2022–2024. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan. <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc3MCMY/jumlah-angkatan-kerja-menurut-kabupaten-kota.html>
- Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. (2024). Data sekolah Kota Makassar 2020–2024 (DAPODIK). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://dapo.dikdasmen.go.id/sp/2/196000>
- Ginting, A. L. (2023). Mengukur Dampak Pendidikan, Pengangguran, Pengeluaran Perkapita, Inflasi terhadap Kemiskinan Dan Gini Ratio di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 348. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2750>
- Hasan, M. (2019). Characteristic of Human Development: Socio-economic Dimension. *KnE Social Sciences*, 3(11), 865–874. <https://doi.org/10.18502/KSS.V3I11.4055>
- Indonesia-Geospasial. (2020, Januari). Download Shapefile RBI Provinsi Sulawesi Selatan Perwilayah (Kabupaten/Kota). <https://www.indonesia-geospasial.com/2020/01/shp-rbi-provinsi-sulawesi-selatan.html>
- Priastiwi, Dian, dan Herniawati Retno Handayani. 2019. “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sulawesi Selatan” *Diponegoro Journal of Economics*1(1):159–69.
- Rahman, A. S., & Hamzah, N. R. (2017). *Posis Penduduk Kota Makassar Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi*. 4(1), 1–22. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ecc/article/view/3343>
- Syam, S., & Wahab, A. (2015). Pengaruh upah dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 35–54. Syam, S., & Wahab, A. (2015). Pengaruh upah dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 35–54.
- Tutu, N. I. (2022). Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Pengaruh Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Linears*, 5(2), 87–96. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/linears/article/view/8503>
- Umar, D. A., Mukramin, S., Arifin, J., & Aziz, F. (2023). Kemiskinan masyarakat urban Makassar. *Jurnal Kajian Pembangunan dan Urbanisasi (JKPU) Nalanda*, 1(3), 12–25.
- Wahyuni, E. S., Nursini, N., & Sabir, S. (2024). Analisis Determinan Ekonomi Dan Sosial Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Makassar. *Development Policy and Management Review*, 164–183. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/article/view/35359>
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik Penajam Paser Utara.